



Pemerintah Kabupaten Ketapang

# PENJENJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN KETAPANG

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**



# Tahap 1

# Tentukan outcome /hasil yang akan dijabarkan

## Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Sesuai Ekspektasi Masyarakat	Sesuai Mandat	Sesuai dengan Isu Strategis
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurangan pada administrasi pelayanan perizinan sehingga bisa meminimalkan budaya antri dan penumpukan peserta yang membutuhkan layanan (Pemetaan Hasil Survei RPJPD Kabupaten Ketapang, 2023)</li><li>2. Perlu dimasifkan pelaksanaan sosialisasi terkait pelayanan perizinan berusaha dan penanaman modal (Pemetaan Hasil Survei RPJPD Kabupaten Ketapang, 2023)</li><li>3. Perlu peningkatan kualitas pelayanan dari segi SDM pelayanan (Pemetaan Hasil Survei RPJPD Kabupaten Ketapang, 2023)</li><li>4. Perlunya pelayanan public dilaksanakan secara <i>online</i> (Pemetaan Hasil Survei RPJPD Kabupaten Ketapang, 2023)</li><li>5. Perlunya penyederhanaan regulasi pelayanan dan pengadaan sistem pengaduan serta ditindaklanjuti (Pemetaan Hasil Survei RPJPD Kabupaten Ketapang, 2023)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal: -Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. -Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.</li><li>2. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal: -Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</li><li>3. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : -Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</li><li>4. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal : -Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</li><li>5. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal: -Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum Optimalnya Investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat masih lemahnya promosi daerah dan terbatasnya kerjasama antar daerah (Renstra DPMPTSP)</li><li>2. Masih rendahnya daya ungkit penanaman modal akibat menurunnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Ketapang (RPJMD Kab Ketapang 2021-2026)</li><li>3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan di mall pelayanan public (Renstra DPMPTSP)</li><li>4. Belum Optimalnya Pelayanan Publik yang efektif dan efisien berbasis IT (Renstra DPMPTSP)</li></ol>

# KERANGKA BERPIKIR LOGIS

Peningkatan Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Akses Yang Mudah Terhadap Sumber Daya (Kualitas Infrastruktur, Darat, Laut, Air )

Strategi Promosi Investasi

Promosi Investasi yang Tepat Sasaran

Pemetaan Potensi Dan Peluang Investasi Daerah

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Potensial di Berbagai Sektor

Sektor Perikanan

Sektor Tanaman Pangan dan perkebunan

Sektor Peternakan

Sektor industri dan perdagangan

Sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran

Sektor Pertanian

Sektor Infrastruktur

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Faktor Biaya (Insentif Pajak Untuk Investor)

Iklim Investasi yang Kondusif

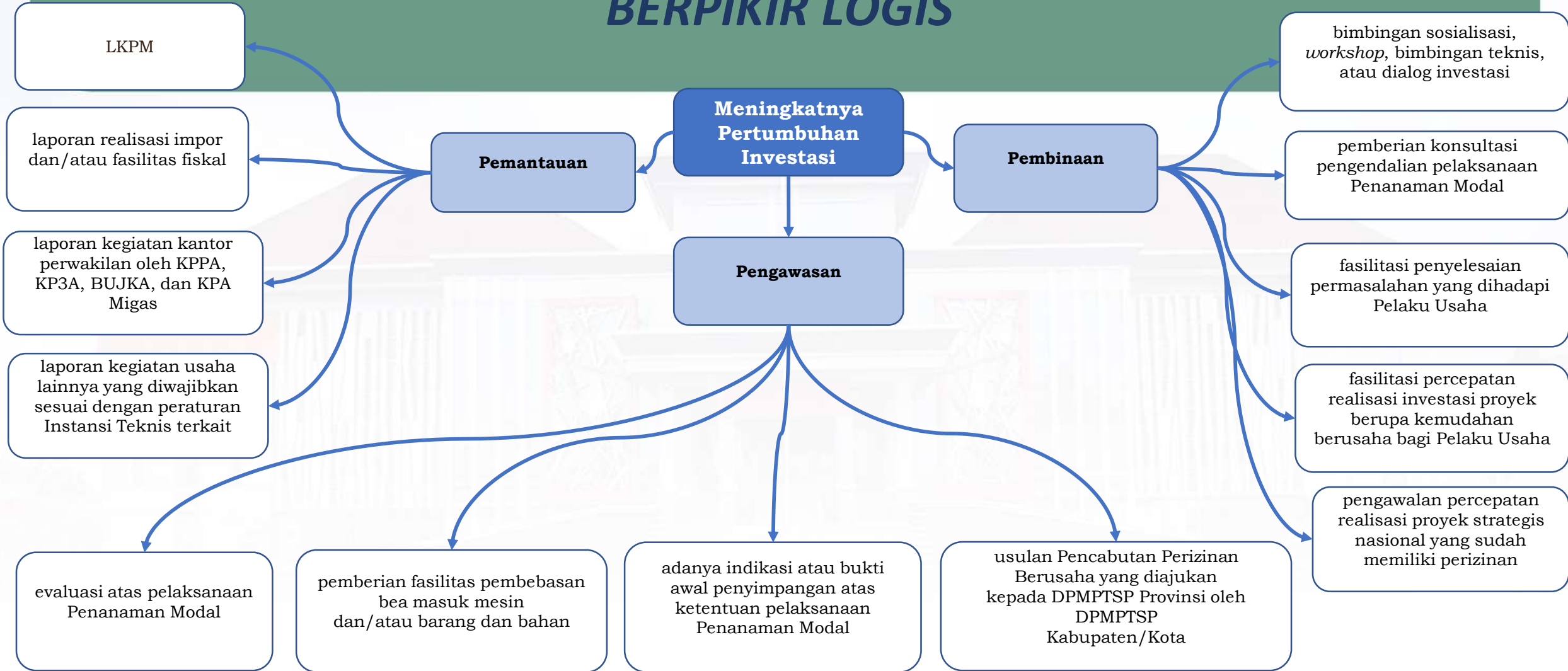
Birokrasi. Kualitas Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal, Biaya Perijinan Dan Administrasi

Stabilitas Kondisi Politik Dan Sosial (Keamanan/Tingkat Kriminalitas Dll)

Ketenagakerjaan: Kuantitas Dan Kualitas Tenaga Kerja, Upah Minimum, Penguasaan Iptek Dll

Kepastian Hukum Dalam Berusaha (Ada atau Tidaknya Pembatasan Atas Kebebasan Berusaha Perda Penanaman Modal Dll)

# KERANGKA BERPIKIR LOGIS





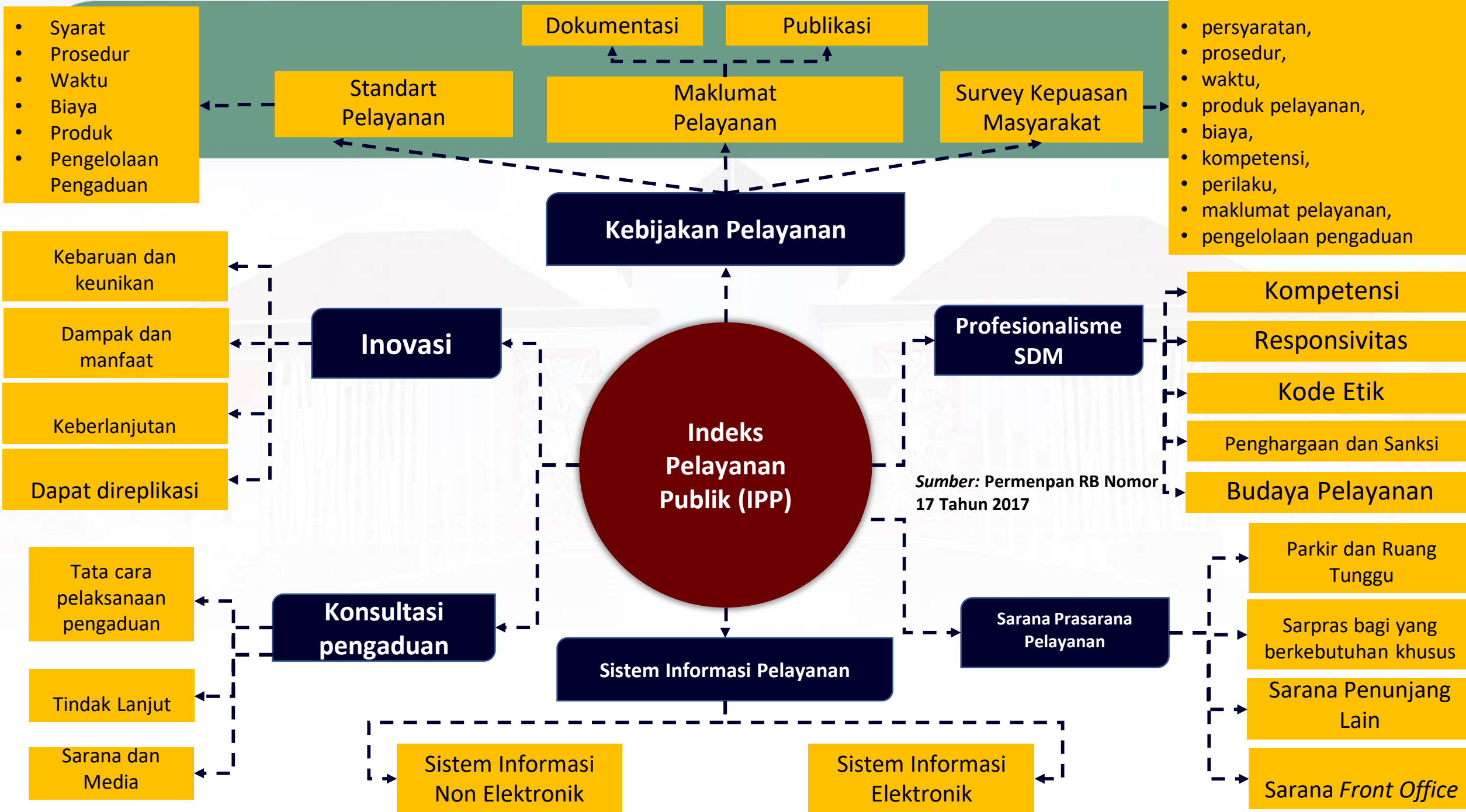
## Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

1. *Tangibles*; tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan bahan komunikasi.
2. *Realibility*; kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya, tepat
3. *Responsiveness*; kemamuan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tepat
4. *Assurance*; pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan
5. *Emphathy*; perhatian individual diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan.

# DELIVERING QUALITY SERVICE

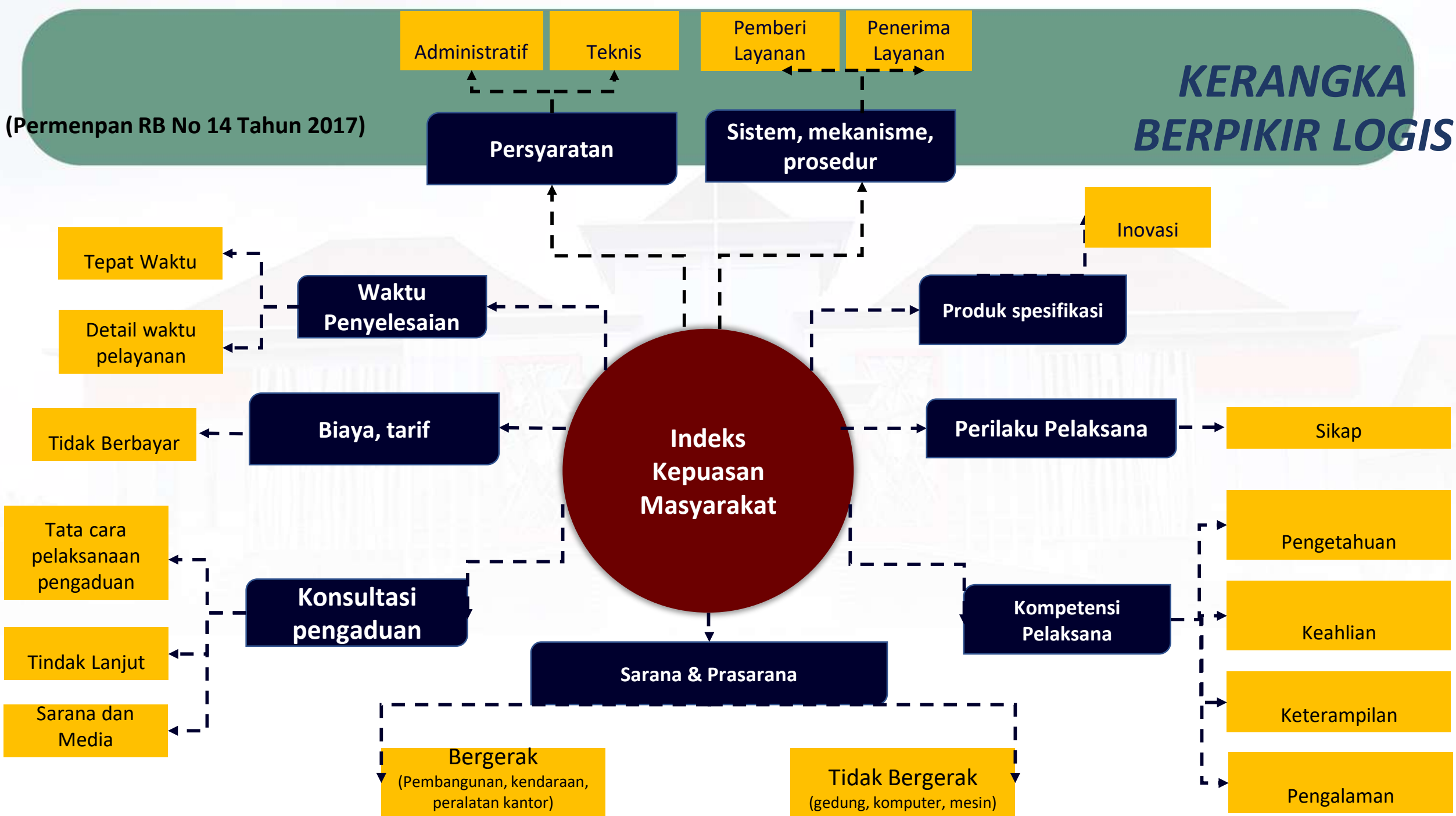
.....*Balancing*.....  
*Customer Perceptions*  
...*and Expectations*...

VALARIE A. ZEITHAML  
A. PARASURAMAN AND LEONARD L. BERRY



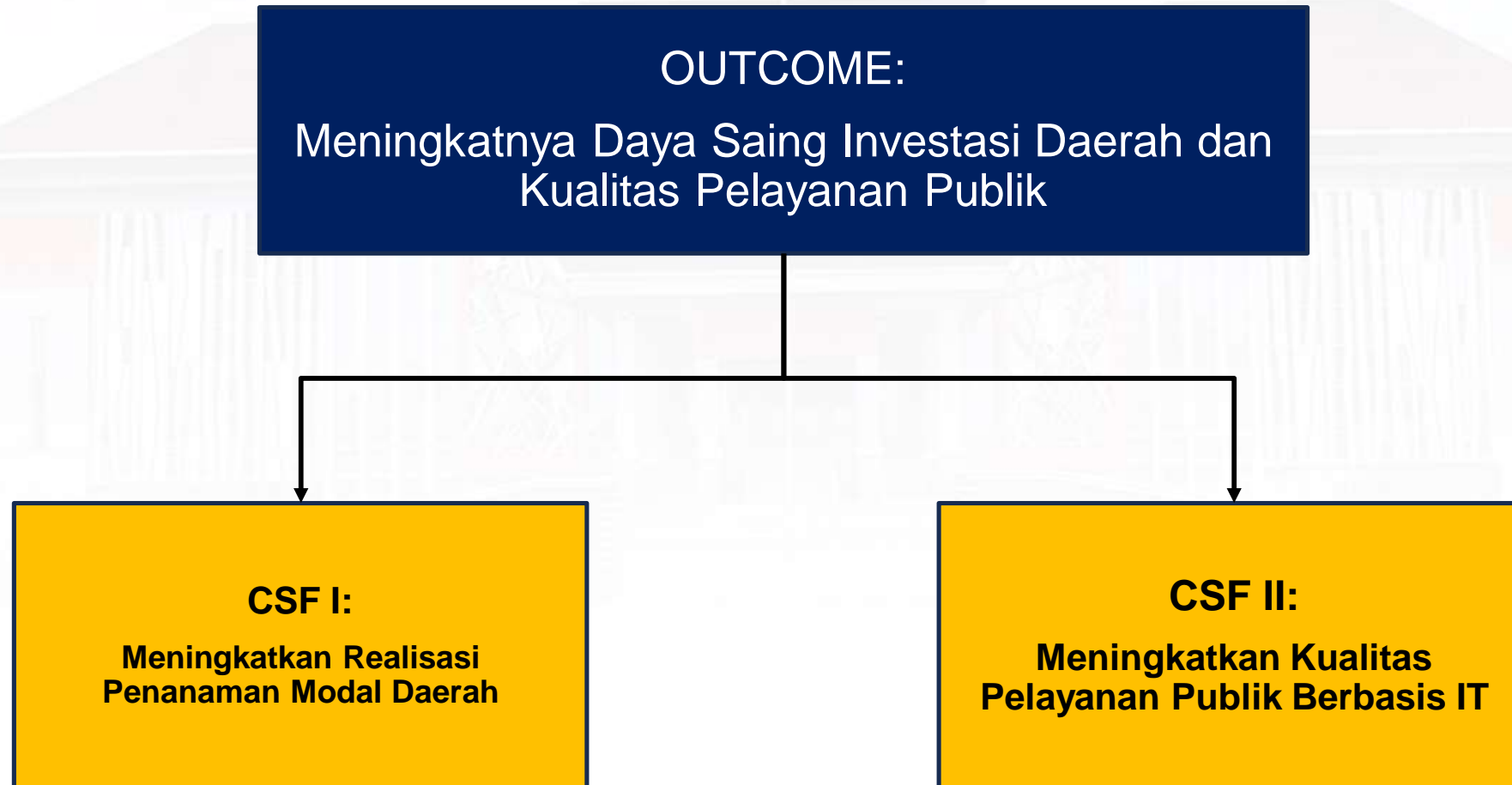
(Permenpan RB No 14 Tahun 2017)

# KERANGKA BERPIKIR LOGIS



## Tahap 2

# Menentukan CSF (Critical Success Factor)





## Tahap 3

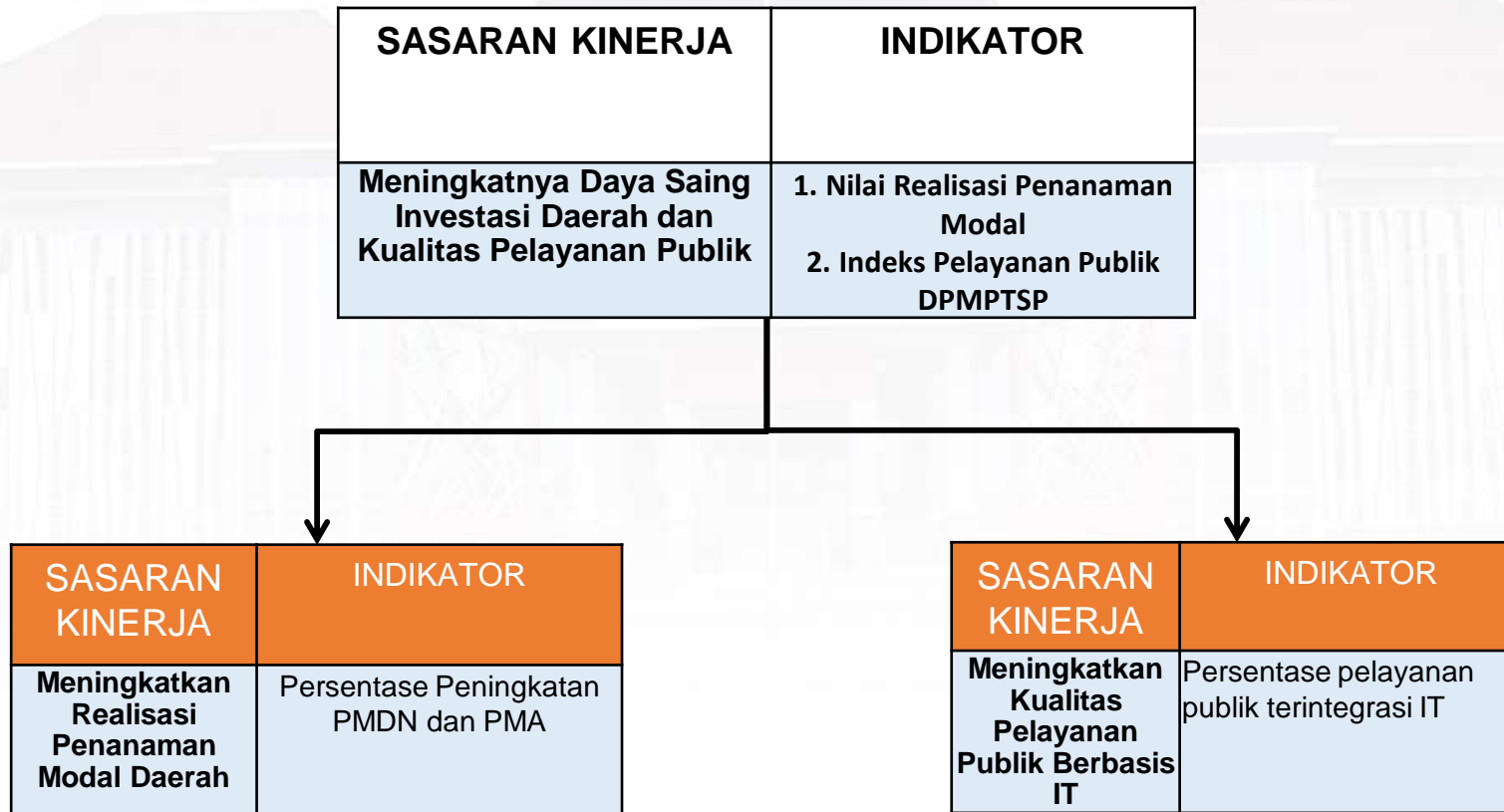
# Menguraikan CSF kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional

### OUTCOME I

Faktor Penyebab/Pembentuk (CSF) I	Kondisi yang diperlukan
<b>Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengembangan iklim penanaman modal daerah</li> <li>Meningkatkan promosi penanaman modal daerah</li> <li>Meningkatkan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal daerah</li> </ul>
Kondisi Antara CSF 1	Kondisi yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengembangan iklim penanaman modal daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemberian kemudahan pada faktor biaya pada investor (insentif pajak untuk investor)</li> <li>Meningkatkan pelaksanaan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan promosi penanaman modal daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyusunan strategi promosi investasi daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengendalian penanaman modal daerah</li> </ul>
Kondisi yang diperlukan	Kondisi Teknis yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kebijakan pemberian kemudahan pada faktor biaya pada investor (insentif pajak untuk investor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas atau insentif dan kemudahan penanaman modal</li> <li>Terfasilitasinya kemitraan untuk usaha besar dan UMKM</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelaksanaan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)</li> <li>Tersusunnya peta peluang usaha daerah</li> <li>Terlaksananya pembuatan profil potensi unggulan investasi daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyusunan strategi promosi investasi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya strategi promosi investasi daerah</li> <li>Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengendalian penanaman modal daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya</li> <li>Terlaksananya Bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penanaman modal daerah</li> <li>Terlaksananya Pengawasan penanaman modal</li> </ul>

## Tahap 4

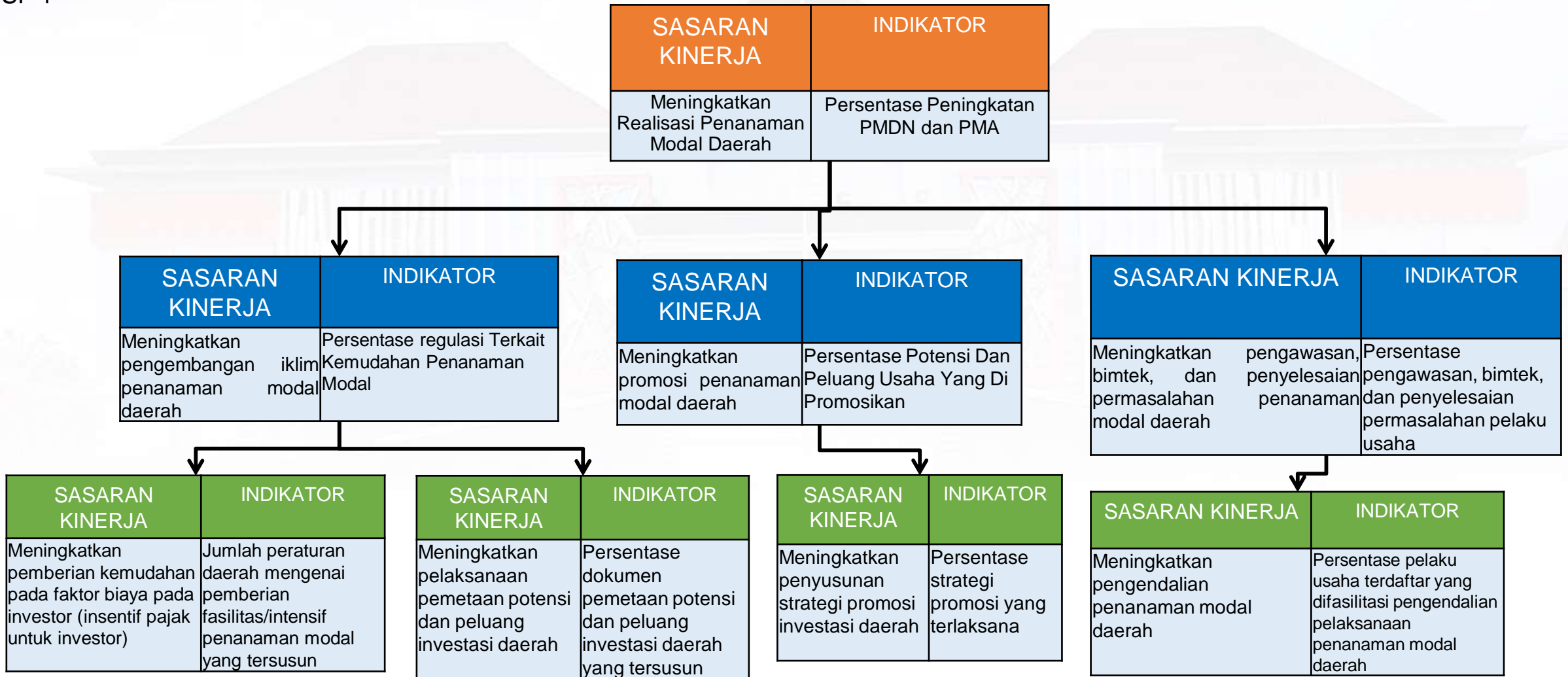
# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)



# Tahap 4

# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

CSF 1



# Tahap 4

# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

CSF 1

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan pengembangan iklim penanaman modal daerah	Persentase regulasi Terkait Kemudahan Penanaman Modal

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan promosi penanaman modal daerah	Persentase Potensi Dan Peluang Usaha Yang Di Promosikan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan pengawasan, bimtek, dan penyelesaian permasalahan modal daerah	Persentase pengawasan, bimtek, dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan pemberian kemudahan pada faktor biaya pada investor (insentif pajak untuk investor)	Jumlah peraturan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang tersusun

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan pelaksanaan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah	Persentase dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi daerah yang tersusun

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan penyusunan strategi promosi investasi daerah	Persentase strategi promosi yang terlaksana

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan pengendalian penanaman modal daerah	Persentase pelaku usaha terdaftar yang difasilitasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Terlaksananya penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas atau insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas atau insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan

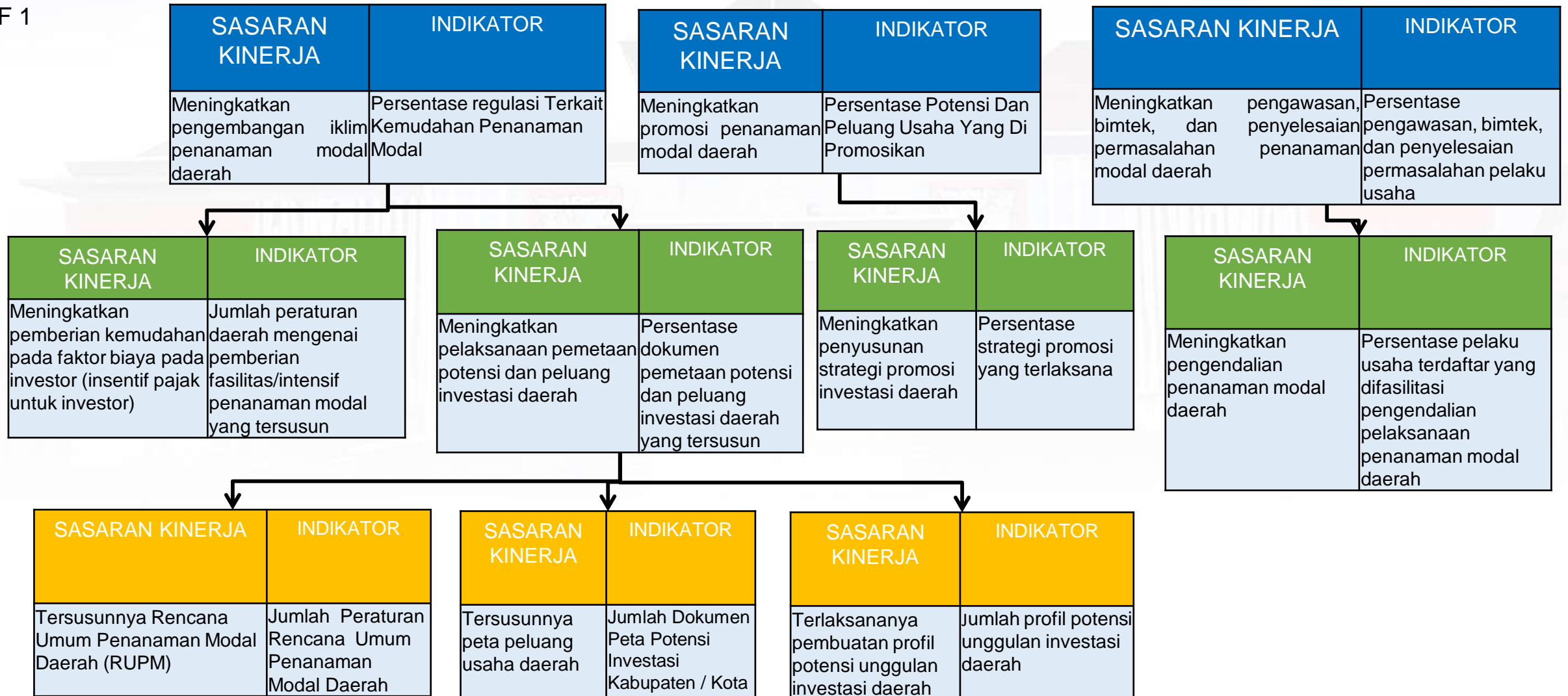
SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Terfasilitasinya kemitraan untuk usaha besar dan UMKM	Jumlah Kesepakatan Kemitraan Antara Usaha Besar Dengan UMKM

DKUKMPP, Dinas Pariwisata Kebudayaan

# Tahap 4

# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

CSF 1

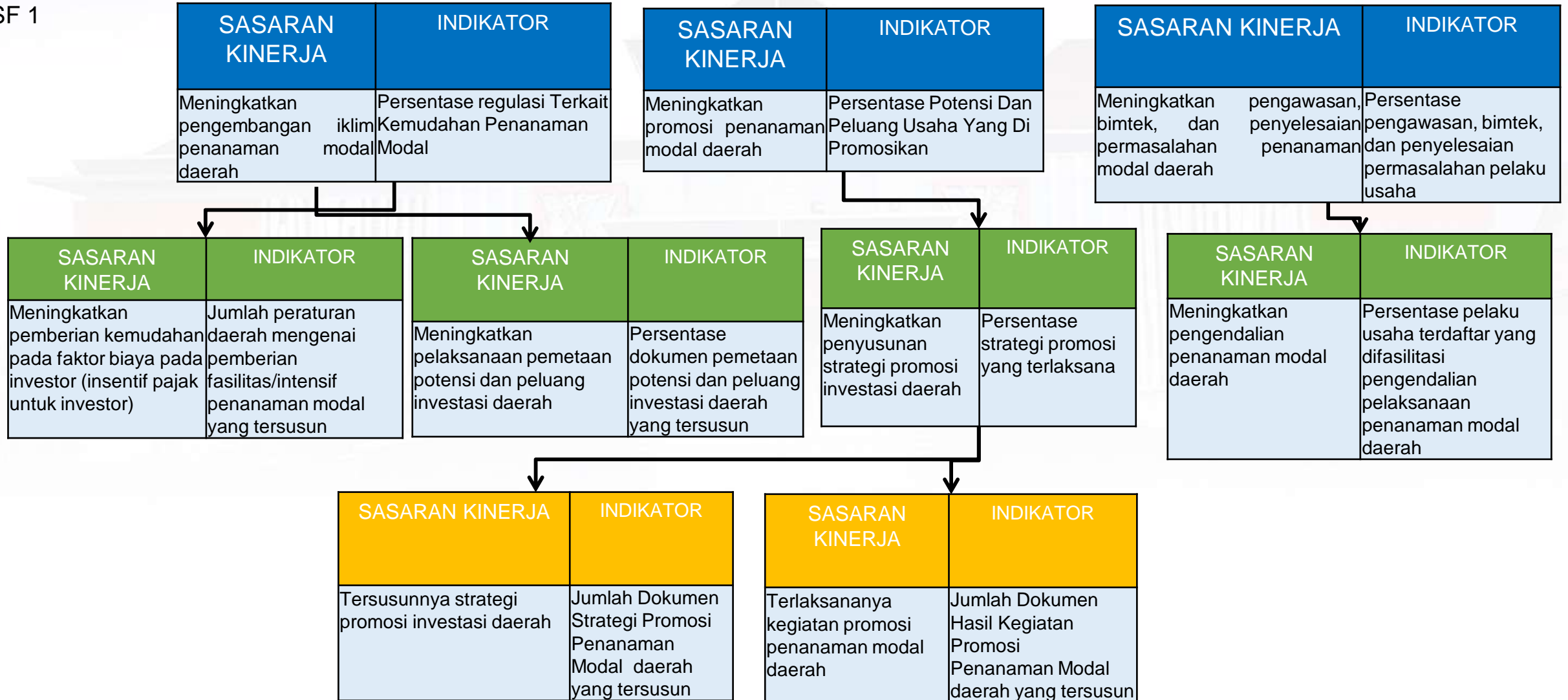




# Tahap 4

# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

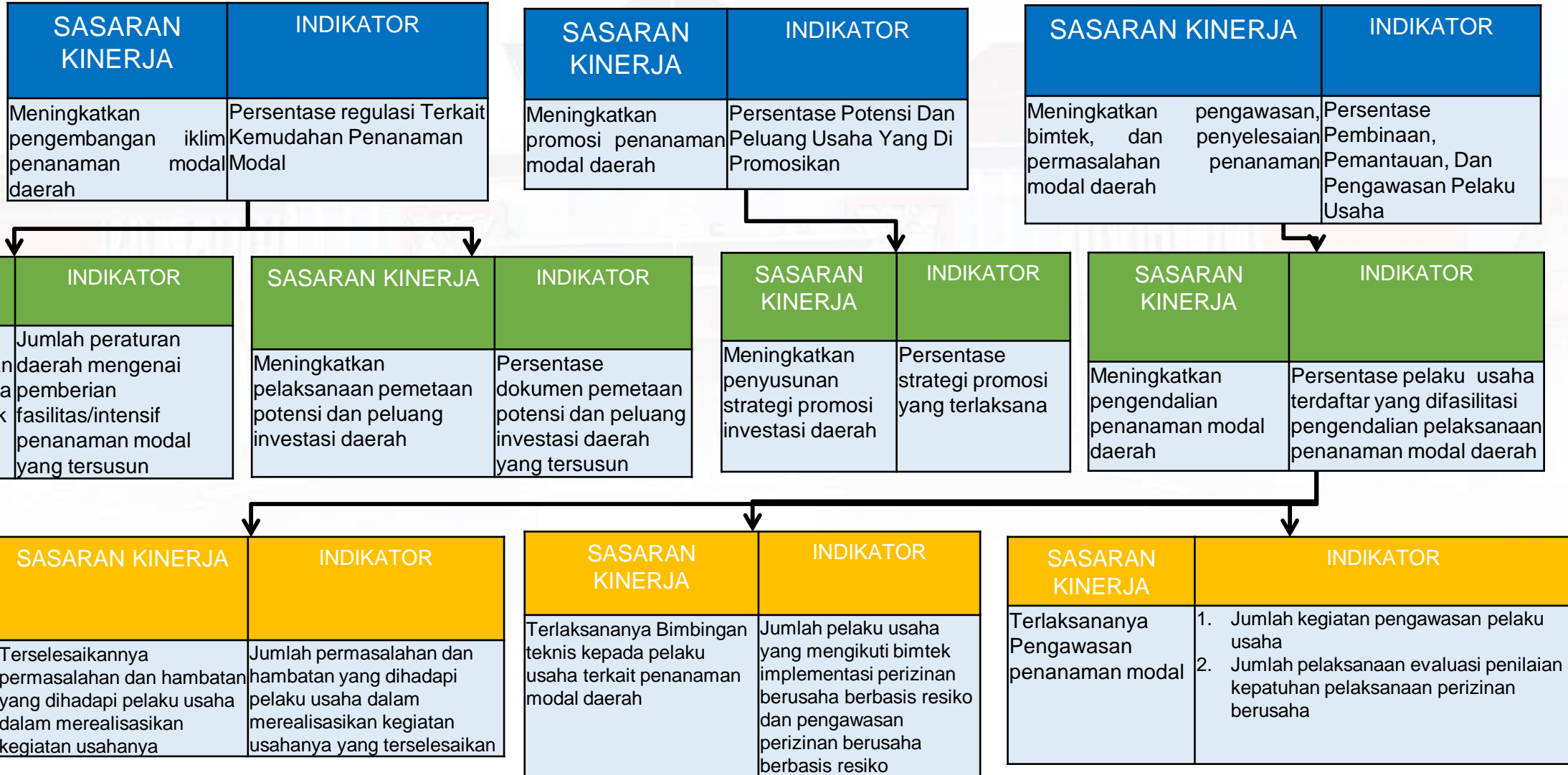
CSF 1



# Tahap 4

# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

CSF 1



## Tahap 3

# Menguraikan CSF kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional

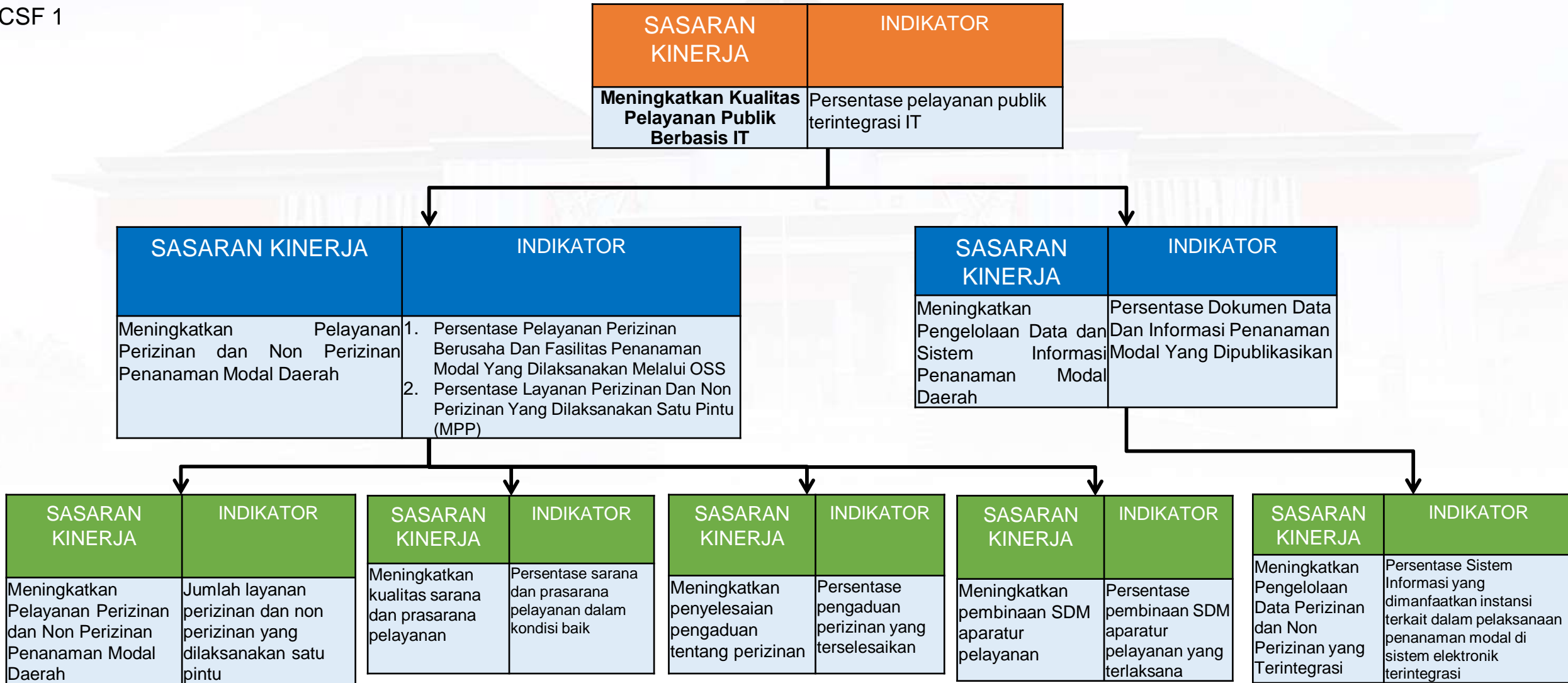
### OUTCOME II

Faktor Penyebab/Pembentuk (CSF) II	Kondisi yang diperlukan
<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah</li> <li>Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah</li> </ul>
Kondisi Antara CSF 2	Kondisi yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah</li> <li>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>Meningkatkan pengaduan tentang perizinan yang terselesaikan</li> <li>Meningkatkan pembinaan SDM aparatur pelayanan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</li> </ul>
Kondisi yang diperlukan	Kondisi Teknis yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah</li> <li>Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko</li> <li>Terlaksananya Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengaduan tentang perizinan yang terselesaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya layanan konsultasi pengaduan perizinan</li> <li>Terlaksananya tindak lanjut pengaduan perizinan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pembinaan SDM aparatur pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pelayanan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik</li> <li>Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik</li> </ul>

# Tahap 4

# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

CSF 1



# Tahap 4

# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

CSF 1

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Fasilitas Penanaman Modal Yang Dilaksanakan Melalui OSS</li> <li>Persentase Layanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan Satu Pintu</li> </ol>

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan satu pintu

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan penyelesaian pengaduan tentang perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang terselesaikan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan pembinaan SDM aparatur pelayanan	Persentase pembinaan SDM aparatur pelayanan yang terlaksana

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah	Jumlah sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah yang dilaksanakan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui System Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Terlaksananya Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Diskominfo, DPUPR, DKUKMPP, DKPP, Distanakbun, Disperkim LH, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan

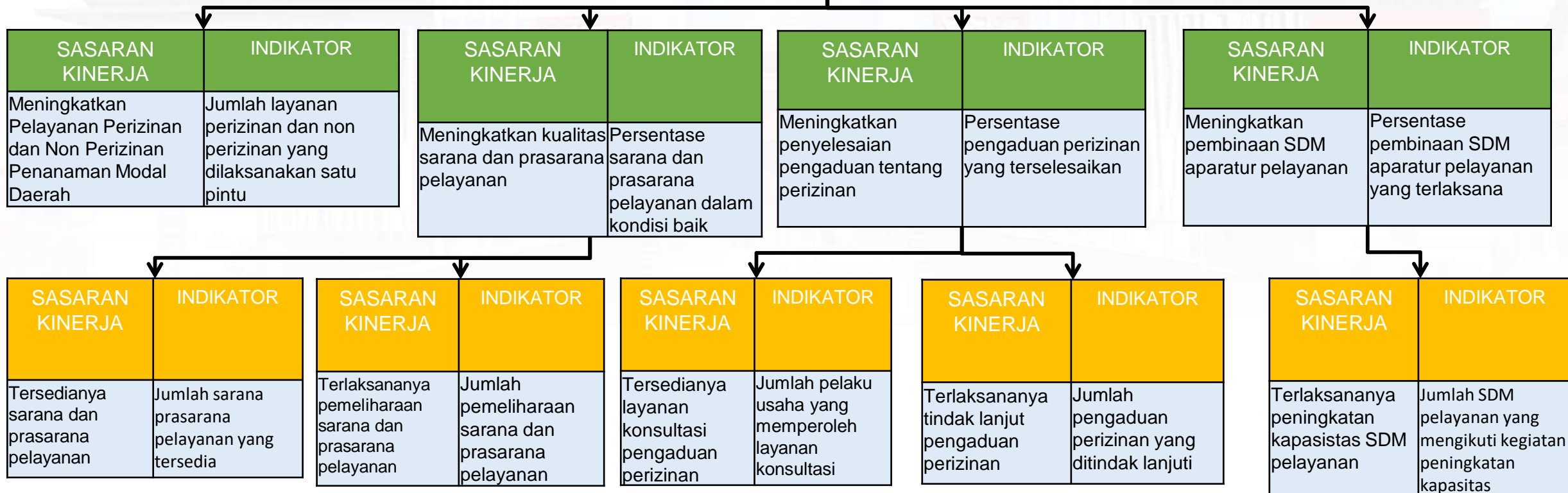


# Tahap 4

# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

CSF 1

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Fasilitas Penanaman Modal Yang Dilaksanakan Melalui OSS</li> <li>Persentase Layanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan Satu Pintu</li> </ol>



# Tahap 4

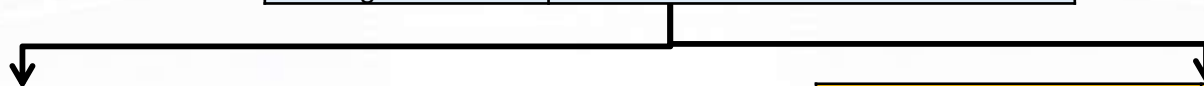
# Menyusun Pohon Kinerja (Disesuaikan dengan Jumlah Komponen Sasaran/ Kinerja)

CSF 1

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah	Persentase Dokumen Data Dan Informasi Penanaman Modal Yang Dipublikasikan



SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Meningkatkan Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi yang dimanfaatkan instansi terkait dalam pelaksanaan penanaman modal di sistem elektronik terintegrasi



SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan dimanfaatkan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan dimanfaatkan

## Tahap 5

# Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

### 1. Menetapkan Kinerja Strategis Urusan/Bidang Urusan sebagai Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target		
		2024	2025	2026
<b>Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik</b>	Nilai Realisasi Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A
	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	N/A	N/A	N/A
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Thn 1</b>	<b>Thn 2</b>	<b>Thn 3</b>
<b>Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal Daerah</b>	Persentase Peningkatan PMDN dan PMA	3,45	4,15	4,85
<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT</b>	Persentase pelayanan publik terintegrasi IT	N/A	N/A	N/A

# Tahap 5

## Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

### 2. Menetapkan Kinerja Manajerial Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program	:	Program pengembangan iklim penanaman modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan pengembangan iklim penanaman modal daerah
Indikator Program	:	Persentase regulasi terkait kemudahan penanaman modal
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan pemberian kemudahan pada faktor biaya pada investor (insentif pajak untuk investor)
Indikator Kegiatan	:	Jumlah peraturan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang ditetapkan
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	0

Nama Program	:	Program Promosi penanaman modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan promosi penanaman modal daerah
Indikator Program	:	Persentase Potensi Dan Peluang Usaha Yang Di Promosikan
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan penyusunan strategi promosi investasi daerah
Indikator Kegiatan	:	Persentase strategi promosi yang terlaksana
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	1.207.606.400

Nama Program	:	Program pengembangan iklim penanaman modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan pengembangan iklim penanaman modal daerah
Indikator Program	:	Persentase regulasi Terkait Kemudahan Penanaman Modal
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan pelaksanaan pemetaan potensi dan peluang investasi daerah
Indikator Kegiatan	:	Persentase dokumen pemetaan potensi dan peluang investasi daerah yang tersusun
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	210.000.000

Nama Program	:	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan pengawasan, bimtek, dan penyelesaian permasalahan penanaman modal daerah
Indikator Program	:	Persentase pengawasan, bimtek, dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan pengendalian penanaman modal daerah
Indikator Kegiatan	:	Persentase pelaku usaha terdaftar yang difasilitasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	0

# Tahap 5

# Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

## 2. Menetapkan Kinerja Manajerial Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program	:	Program Pelayanan Penanaman modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah
Indikator Program	:	Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Fasilitas Penanaman Modal Yang Dilaksanakan Melalui OSS
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah
Indikator Kegiatan	:	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan satu pintu
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	0

Nama Program	:	Program Pelayanan Penanaman modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah
Indikator Program	:	Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Fasilitas Penanaman Modal Yang Dilaksanakan Melalui OSS
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan penyelesaian pengaduan tentang perizinan
Indikator Kegiatan	:	Persentase pengaduan perizinan yang terselesaikan
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	0

Nama Program	:	Program Pelayanan Penanaman modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah
Indikator Program	:	Persentase Layanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan Satu Pintu
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
Indikator Kegiatan	:	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	0

Nama ProgramX	:	Program Pelayanan Penanaman modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah
Indikator Program	:	Persentase Layanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan Satu Pintu
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan pembinaan SDM aparatur pelayanan
Indikator Kegiatan	:	Persentase pembinaan SDM aparatur pelayanan yang terlaksana
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	0



## Tahap 5

# Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

## 2. Menetapkan Kinerja Manajerial Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program	:	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Sasaran Program	:	Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah
Indikator Program	:	Persentase Dokumen Data Dan Informasi Penanaman Modal Yang Dipublikasikan
Target Program	:	N/A
Anggaran	:	0
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
Indikator Kegiatan	:	Persentase Sistem Informasi yang dimanfaatkan instansi terkait dalam pelaksanaan penanaman modal di sistem elektronik terintegrasi
Target Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	139.339.200

# Tahap 5

## Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

### 3. Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran Subkegiatan

Nama Sub Kegiatan	:	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas atau insentif dan kemudahan penanaman modal
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Target Sub Kegiatan	:	64.414.080
Anggaran	:	1 Dokumen

Nama Sub Kegiatan	:	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terfasilitasinya kemitraan untuk usaha besar dan UMKM
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah
Target Sub Kegiatan	:	10 Kegiatan
Anggaran	:	60.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten / Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
Target Sub Kegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	100.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten / Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	1. Tersusunnya peta peluang usaha daerah 2. Terlaksananya pembuatan profil potensi unggulan investasi daerah
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Target Sub Kegiatan	:	10
Anggaran	:	110.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersusunnya strategi promosi investasi daerah
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota
Target Sub Kegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	220.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal daerah
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota
Target Sub Kegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	987.606.400

# Tahap 5

## Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

### 3. Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran Subkegiatan

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Target Sub Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	103.017.600

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penanaman modal daerah
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Target Sub Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	155.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Pengawasan penanaman modal
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Target Sub Kegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	160.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Sasaran Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko</li> <li>2. Tersedianya layanan konsultasi pengaduan perizinan</li> <li>3. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan perizinan</li> </ol>
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Target Sub Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	350.365.600

Nama Sub Kegiatan	:	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terlaksananya Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
Target Sub Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	220.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Sasaran Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko</li> <li>2. Tersedianya layanan konsultasi pengaduan perizinan</li> <li>3. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan perizinan</li> </ol>
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Target Sub Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	146.000.000

# Tahap 5

## Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

### 3. Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran Subkegiatan

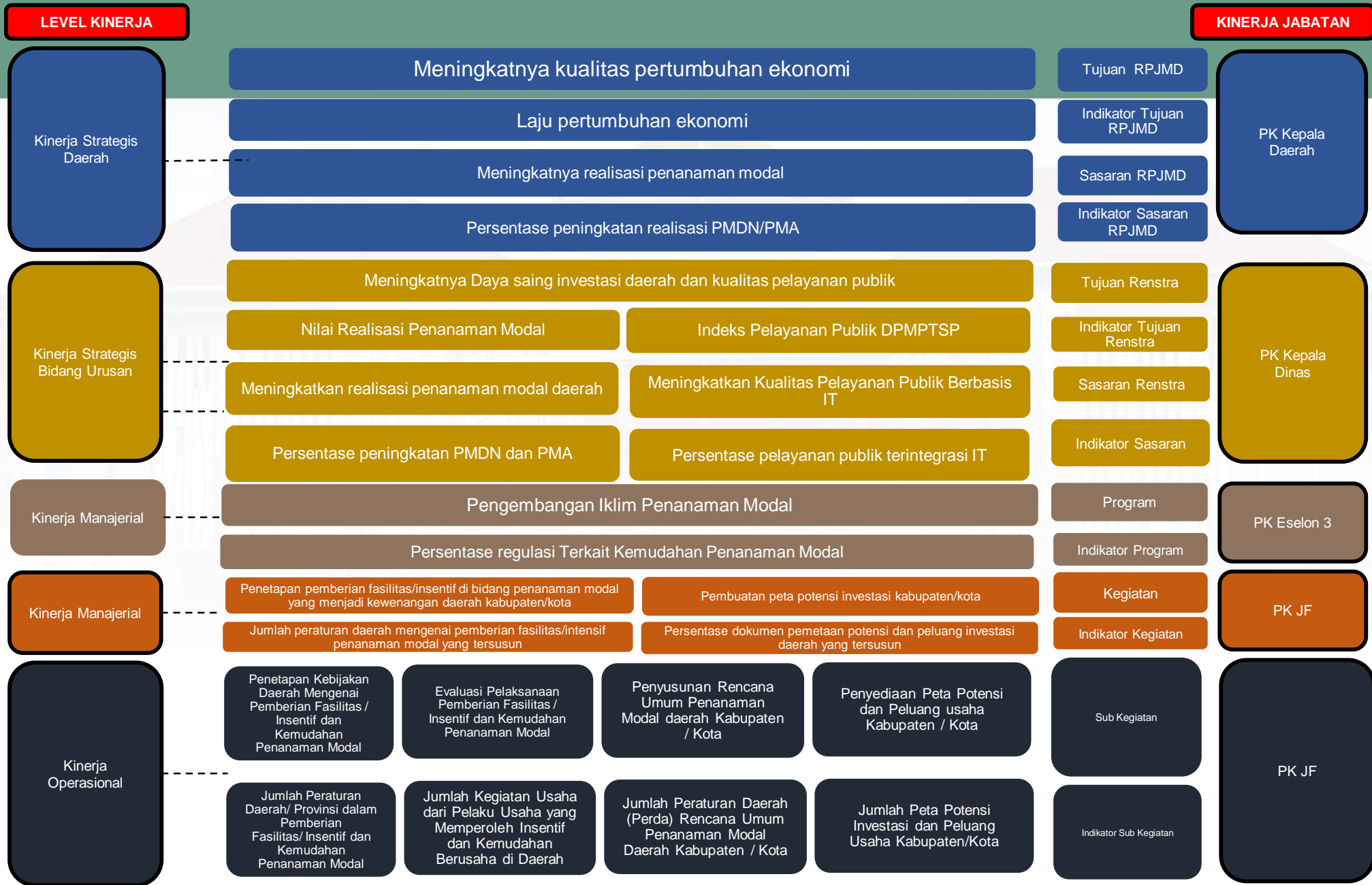
Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Sasaran Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berbasis Resiko</li> <li>2. Tersedianya layanan konsultasi pengaduan perizinan</li> <li>3. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan perizinan</li> </ol>
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Target Sub Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	146.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah
Sasaran Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah</li> <li>2. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pelayanan</li> </ol>
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Target Sub Kegiatan	:	N/A
Anggaran	:	50.000.000

Nama Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sasaran Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik</li> <li>2. Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik</li> </ol>
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
Target Sub Kegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	139.339.200

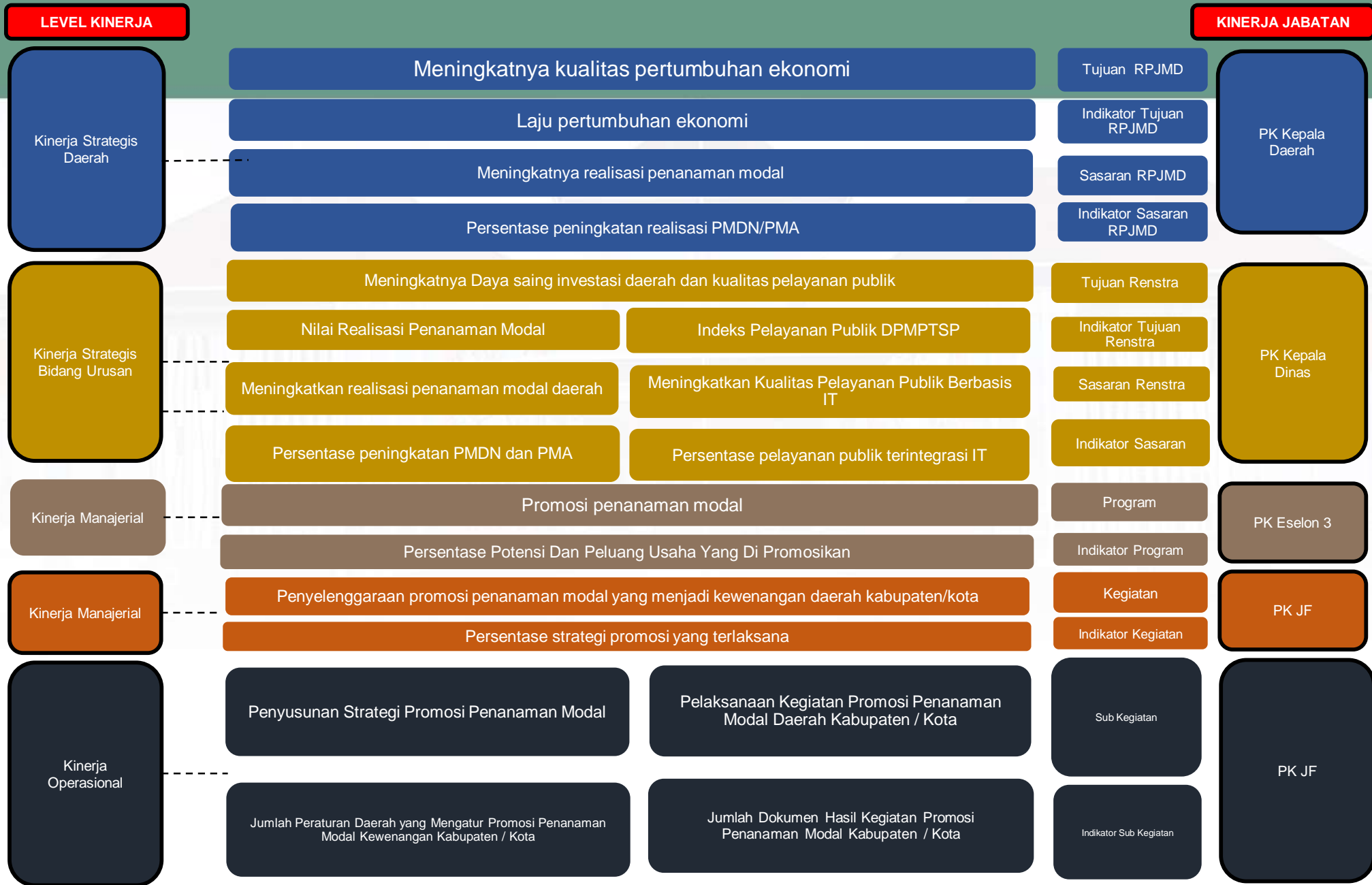
# Tahap 5

# Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan



# Tahap 5

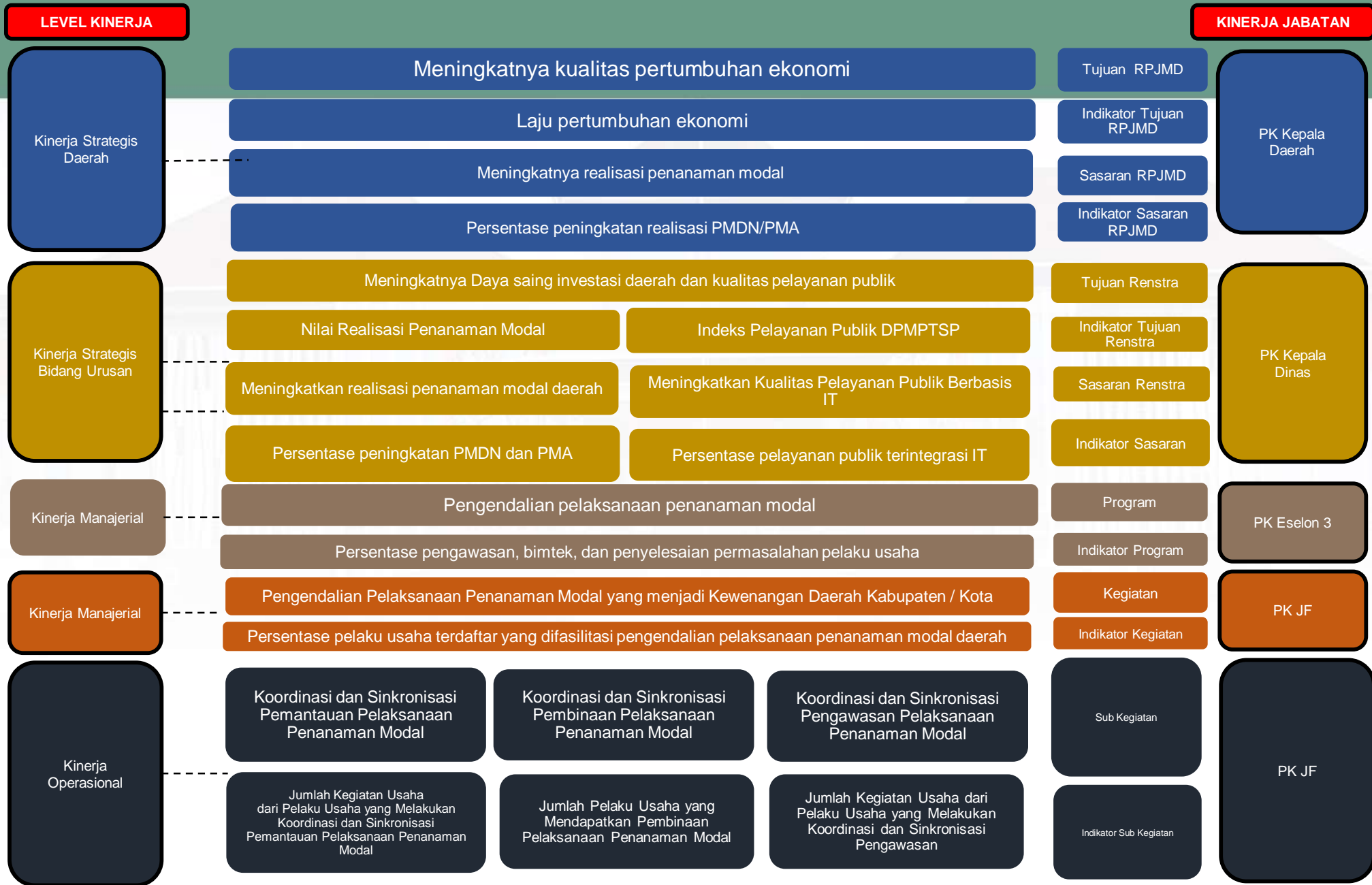
# Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan





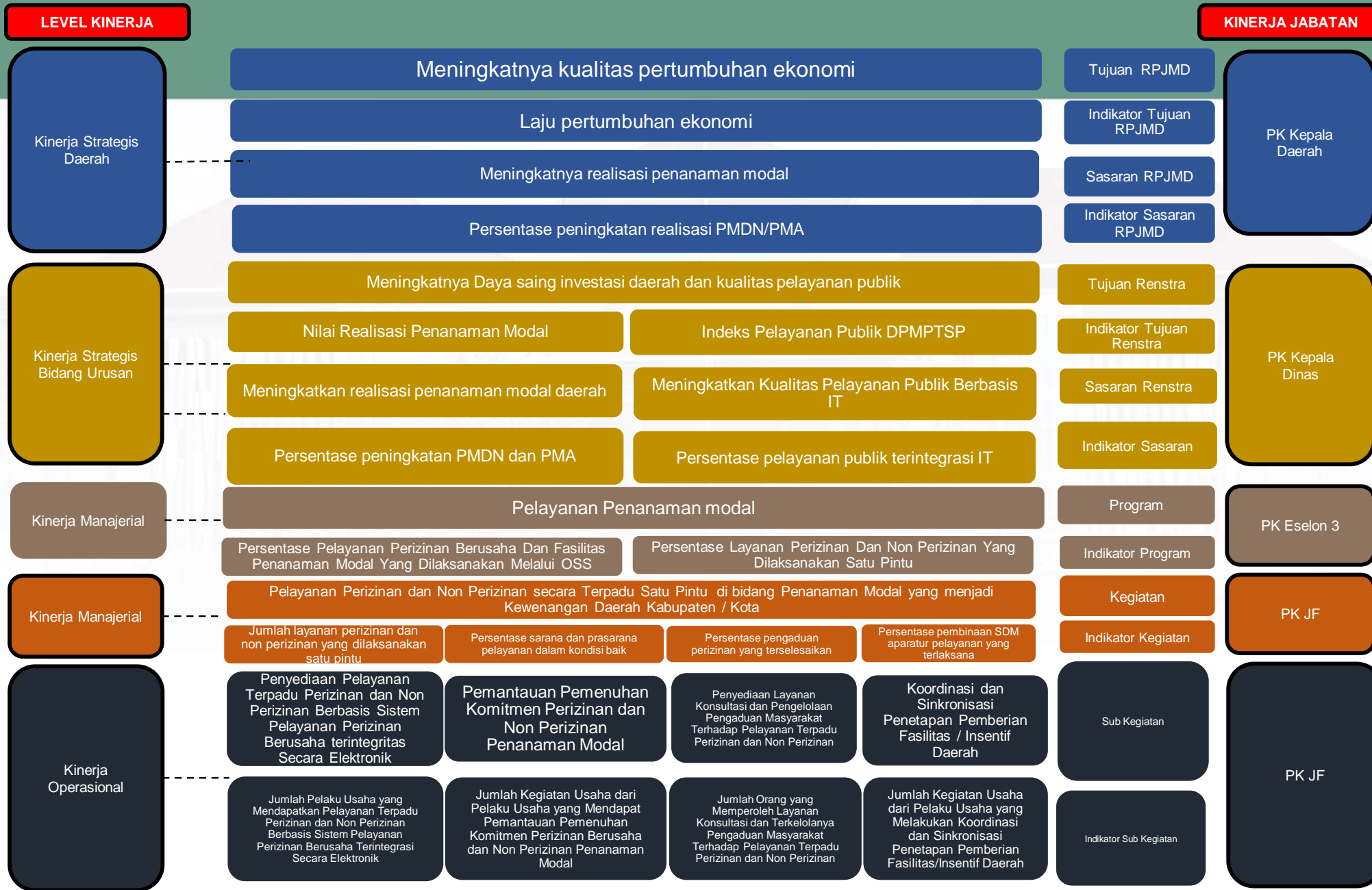
# Tahap 5

# Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan



# Tahap 5

# Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan



# Tahap 5

# Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan

